

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bergulirnya wacana otonomi daerah yang ditandai dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa implikasi penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/ kota, walaupun pengelolaan harus tetap mengacu pada standar yang ditetapkan secara nasional (pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004)

Implementasi sistem pemerintahan otonomi daerah tercermin dalam manajemen pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan telah mengalami perubahan, yang pada era sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Paradigma desentralisasi pendidikan memang menjadi agenda yang penting. Desentralisasi pendidikan mempunyai dua tuntutan, yaitu: pertama, akuntabilitas horizontal pendidikan nasional, yaitu akuntabilitas terhadap masyarakat sebagai pemiliknya. Kedua, akuntabilitas vertikal pendidikan nasional, yaitu akuntabilitas dalam pengembangan social capital persatuan bangsa Indonesia. Realita dilapangan menunjukkan adanya keragaman

kondisi sekolah dan kemampuan ekonomi masyarakat yang mendukung terselenggaranya sekolah. Oleh karena itu pemerintah telah mengklarifikasikan sekolah menjadi Sekolah Perintis, Sekolah Potensial/Pengembang, Sekolah Standar Nasional (SSN) dan sekolah bertaraf Internasional (SBI).

Perlu adanya perlakuan yang berbeda antar sekolah, untuk itu perlu diberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah bersama masyarakat sekitar untuk mengambil keputusan-keputusan kongkrit dalam pengelolaan pendidikan sehingga mutunya meningkat. Kewenangan tersebut harus dikelola dengan baik, untuk itu perlu dilaksanakan sebuah model manajemen sekolah yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Model tersebut adalah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas pendidikan bagi masa depan generasi penerus mereka telah memberikan implikasi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan sekolah di dalam usaha pendidikannya. Dengan adanya peningkatan mutu sekolah, menuntut konsekuensi sekolah-sekolah yang ada harus berusaha untuk melakukan pembenahan internal sehingga mampu menampilkan keunggulan dan memenuhi tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan yang selama ini di idam-idamkan.

Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah produk jasa yang “dijual” pihak sekolah kepada masyarakat sebagai konsumennya. Sebuah sekolah

dapat dinilai memiliki keunggulan jika sekolah tersebut mampu memberikan pelayanan jasa pendidikan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini mengingat peran sekolah dinilai sangat strategis bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat dan terjaminnya kehidupan mereka kelak dikemudian hari.

Dalam hal ini pengelolaan sekolah berperan penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa yang efisien.

Pelayanan pendidikan sebagai pelayanan jasa pada bidang pendidikan adalah termasuk salah satu bentuk pelayanan public (*public services*). Melalui penerapan pendekatan TQM, pelayanan jasa pendidikan pada otonomi daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik, lebih berkualitas dan lebih unggul. Menurut Lupriyadi (2001:148) ada lima dimensi kualitas jasa yang perlu diperhatikan bagi pelayanan public agar kualitas pelayanan dapat tercapai yaitu tangibles (penampilan), reliability(keterandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (keterjaminan) dan empathy (perhatian). Dalam aktualisasinya kelima dimensi ini merupakan factor-faktor yang dipertimbangkan dan dapat

mempengaruhi minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di suatu sekolah.

Suatu penelitian yang dilakukan Padmantyo, dkk (2004) tentang penilaian kepuasan konsumen internal di bidang jasa pendidikan menyimpulkan bahwa usaha untuk menjadi suatu yang terbaik dan memenangkan bisnis bagi tim perusahaan, termasuk didalamnya adalah lembaga pendidikan adalah dengan mewujudkan kepuasan total terhadap pelanggan. Lembaga pendidikan yang mampu mewujudkan kepuasan total adalah lembaga yang paham dengan makna kualitas dan pelayanan.

Berpijak pada realitas kondisi SMK yang sangat beragam, guna memudahkan bagi sekolah dan masyarakat pada umumnya untuk memahami bagaimana wujud sekolah yang telah memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan) diperlukan contoh nyata, berupa Sekolah Standar Nasional (SSN).

SMK Sahid merupakan salah satu SMK terbaik di Surakarta yang memiliki laboratorium dan ruang perpustakaan sesuai dengan potensi keahlian siswa. Selain itu siswa di SMK Sahid juga bisa secara langsung mengikuti pembelajaran praktek di jaringan industri yang dimiliki Sahid grup. Keunggulan lainnya bagi lulusan terbaik di SMK Sahid bisa langsung disalurkan bekerja di jaringan industri Sahid grup dan industri-industri yang melakukan MOU dengan Sahid grup.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan dikaji pengelolaan sekolah berbasis mutu di SMK Sahid Solo.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pengelolaan sekolah berbasis mutu di SMK Sahid Surakarta, dengan 3 (tiga) subfokus.

1. Bagaimana perencanaan sekolah berbasis mutu di SMK Sahid Surakarta ?
2. Bagaimana pelaksanaan sekolah berbasis mutu di SMK Sahid Surakarta?
3. Bagaimana pengendalian sekolah berbasis mutu di Sahid Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan sekolah berbasis mutu di SMK Sahid Surakarta
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sekolah berbasis mutu di SMK Sahid Surakarta
3. Untuk mendiskripsikan pengendalian sekolah berbasis mutu di SMK Sahid Surakarta

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Bagi sekolah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja manajemen sekolah dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan manajemen kualitas pendidikan berikutnya dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat akan pemenuhan tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan.

2. Manfaat praktis

Bagi peneliti lain

Hasil penelitian dapat menjadi masukan dan pembanding dari segi teknis maupun temuan serta dapat menjadi bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai manajemen sekolah, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan berbasis kualitas.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memotivasi, mengendalikan dan

mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan mendayagunakan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Mutu

Berdasarkan definisi pandangan konfensial maupun strategic, dapat disimpulkan bahwa mutu pada dasarnya adalah : 1) Mutu terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan sehingga memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu dan 2) Mutu terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan dan kerusakan.